

KEGAGALAN YUNANI MEMANFAATKAN *BAILOUT* DALAM UPAYA MENGATASI KRISIS EKONOMI TAHUN 2008

Oleh:

Boy Yusuf Pane¹

(boypane93@yahoo.co.id)

Pembimbing : Drs. Idjang Tjarsono, M.Si

Bibliografi : 20 Jurnal dan/atau *Working Papers*, 5 Buku, 4 Media Online

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Most of the European countries has been cautiously observing the contraction of the Greek system which is closely tied to their own economies. It has captured the attention of the world and continued to send warning signs to countries about system of the governance and public finance. Thus, the case of the Greek crisis has been a good example of how bad management of public finances, Regional Institutions, and domestic politics condition can lead to an economic catastrophe. This research is aimed to explain the failure of Greece on overcoming the debt crisis and also its failure using the bailout aid from European Union.

This research theoretically has built with rationalism perspectives on International Relations and supported by Complex Interdependence theories, and also the concept of Diplomatic Bailout in International Political-economy. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Scope of this research is Greece's Failure applying the bailout aid from European Union on overcoming its economic crisis.

Researcher has formulated an answered-hypothesis which reveals the facts that Greece failure is caused by the complexity of the bailout itself. The complexity came from first, high level of financial interest of European Union to overcome its financial stability than the Greece financial interest itself. Second, the domestic politics condition in Greece and the third is the gap between intergovernmental aspects and national sovereignty within Euro-zone States after crisis.

Keywords: *European Crisis, Greece Debt Crisis, Greece, European Union, Bailout.*

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kegagalan Yunani dalam memanfaatkan dua tahapan dana talangan (*bailout*) dari Uni Eropa dalam upaya menyelamatkan krisis ekonomi negaranya. Saat ini utang Yunani diperkirakan telah mencapai 120% dari posisi GDP-nya, dimana banyak analis yang memperkirakan bahwa data yang sesungguhnya kemungkinan lebih besar dari itu.²

Keadaan semakin memburuk ketika pada awal tahun 2010, diketahui bahwa Pemerintah Yunani telah membayar Goldman Sachs dan beberapa bank investasi lainnya, untuk mengatur transaksi yang dapat menyembunyikan angka sesungguhnya dari jumlah utang pemerintah.

Pada Mei 2010, Yunani sekali lagi ketahuan telah mengalami defisit hingga 13.6%. Salah satu penyebab utama dari defisit tersebut adalah banyaknya kasus penggelapan pajak, yang diperkirakan telah merugikan negara hingga US\$ 20 miliar per tahun.³

Bank Sentral Eropa sebagai penentu kebijakan di zona euro dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Pilihan pertama yaitu membiarkan Yunani bangkrut atau gagal bayar dan dikeluarkan dari zona euro. Namun pilihan ini mempunyai satu resiko besar, bank-bank di zona euro akan mengalami kerugian besar yang bisa menimbulkan krisis keuangan besar yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian zona euro dan perekonomian

dunia karena banyak bank di dunia yang memegang obligasi pemerintah Yunani.

Pilihan kedua adalah menolong Yunani dengan memberi dana talangan, dan disertai dengan jaminan untuk obligasi pemerintah Yunani. Namun, pilihan ini juga beresiko piutang dari negara negara anggota yang menolong Yunani akan bertambah.

Dibentuklah Troika yaitu IMF, *Europe Commission*, dan *Europe Central Bank* sebagai komite untuk mengelola krisis di Yunani. Troika mengambil keputusan untuk mengambil langkah penyelamatan dengan memberikan *bailout* yang akan diberikan dalam enam tahapan. Sampai saat ini dana talangan baru sampai pada tahap kedua.

Yunani juga diberikan konsekuensi-konsekuensi atas bantuan dana talangan tersebut diantaranya⁴;

1. Yunani harus menerapkan kebijakan penghematan yang sistemik (*Austerity*) dimana hal ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat Yunani.
2. Yunani juga diwajibkan untuk memprivatisasi aset-aset kenegaraan.
3. Yunani didesak untuk mereformasi struktur-struktur politiknya.

Pada tanggal 2 Mei 2010, Troika meluncurkan dana talangan pinjaman sebesar €110 miliar untuk menyelamatkan Yunani dari kegagalan pembayaran hutang pemerintah dan menutupi kebutuhan-kebutuhan keuangan di seluruh bulan Mei 2010 sampai bulan Juni 2013, dengan syarat melakukan penerapan langkah-langkah

² *Krisis Ekonomi Eropa Sudah Menjalar ke Indonesia* <http://www.bisnis.com/articles/nah-lo-dot-krisis-ekonomieropa-sudah-menjalar-ke-indonesia> diakses tanggal 20 Juli 2015

³ *Penyebab Krisis Ekonomi Eropa*, <http://mss-feui.com/?p=605/2012/10/10> diakses tanggal 25 Juli 2015

⁴ Lihat Higgins, Matthew; Klitgaard, Thomas. 2011. *"Saving Imbalances and the Euro Area Sovereign Debt Crisis. Current Issues in Economics and Finance* (Federal Reserve Bank of New York)

penghematan, reformasi struktural dan privatisasi aset-aset pemerintah.

Setahun kemudian, resesi yang memburuk bersamaan dengan ditundanya pelaksanaan kondisi yang disepakati dalam program dana talangan pertama oleh pemerintah Yunani menyingkapkan kebutuhan Yunani untuk menerima dana talangan kedua senilai €130 miliar, sedangkan semua kreditur swasta menahan obligasi-obligasi pemerintah Yunani yang diperlukan pada saat yang sama untuk menandatangani kesepakatan menerima perpanjangan jatuh tempo, tingkat bunga yang lebih rendah, dan kerugian 53.5% nilai nominal.

Program dana talangan kedua akhirnya disahkan oleh semua pihak pada bulan Februari 2012, dan dengan efek memperpanjang program pertama, yang berarti dengan total €240 miliar akan ditransfer pada angsuran teratur sepanjang periode bulan Mei 2010 sampai bulan Desember 2014.

Karena resesi yang memburuk dan penundaan lanjutan pelaksanaan kondisi dalam program dana talangan tersebut, pada bulan Desember 2012 Troika bersedia memberikan Yunani kesempatan terakhir mengenai langkah-langkah bantuan hutang yang signifikan, sedangkan IMF memberikan dukungan dengan tambahan €8.2 miliar dari pinjaman yang ditransfer selama periode bulan Januari 2015 sampai bulan Maret 2016.

Yunani telah menerima dana talangan sebesar 148.6 miliar euro dari UE/IMF sejak Mei 2010. Selain itu, ECB juga menguasai surat obligasi pemerintah Yunani senilai 50 miliar euro. Program periode pertama yang berlangsung antara Mei 2010 hingga Desember 2011: 73 miliar euro (52.9 miliar euro dari UE dan 20.1 miliar euro dari IMF). Program

periode kedua yang berlangsung antara Maret-Juni 2012: 75.6 miliar euro (14.4 miliar euro dari UE, 59.5 miliar euro dari *European Stability Financial Facility* (EFSF)⁵ dan 1.7 miliar euro dari IMF). Sisa dari program periode kedua: 88.8 miliar euro menjelang akhir tahun 2014. (70.7 miliar euro dari EFSF dan 17.6 miliar euro dari IMF). Total dana bantuan yang dialokasikan untuk Yunani: sekitar 244 miliar euro dari UE/IMF, ditambah bantuan dari ECB berupa surat obligasi senilai 50 miliar euro.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Neoliberal, teori Interdependensi Kompleks dan Institusi Internasional, dan konsep *bailout*. Perspektif neoliberal menurut David Harvey adalah⁶:

“*Bailout* nasional adalah hal yang tidak akurat, karena *bailout* tidak merusak seluruh sistem keuangan yang ada, bantuan *bailout* yang diberikan oleh negara lain hanya akan menolong bank, kelas kapital, membayar utang mereka, pelanggan mereka dan hanya menguntungkan kelompok mereka. Bantuan dalam

⁵ Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa (EFSF) adalah sebuah kendaraan khusus yang didanai oleh anggota-anggota zona euro untuk menekan krisis utang nasional Eropa. Pendiriannya disetujui oleh 27 negara anggota Uni Eropa pada 9 Mei 2010 dengan tujuan melindungi stabilitas keuangan di Eropa dengan menyediakan bantuan keuangan kepada negara-negara zona euro ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Fasilitas ini berkantor pusat di Luxembourg City, dan Bank Investasi Eropa menyediakan jasa manajemen keuangan dan dukungan administratif melalui kontrak tingkat jasa.

⁶ The Crisis and the Consolidation of Class Power Is This Really the End of Neoliberalism? Terdapat dalam <http://www.counterpunch.org>, diakses pada tanggal 3 Juli 2015 pukul 05.55 WIB.

bentuk uang tersebut akan masuk ke bank, bukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian negara yang rusak, hal inilah yang mulai membuat kemarahan. Bank-bank tersebut menggunakan bantuan uang bukan untuk mengembalikan kondisi perekonomian negara, namun untuk membeli bank lain. Bank dan kelas kapital hanya mengkonsolidasikan kekuatan kelas mereka.“

Teori Interdependensi Kompleks dan Institusi Internasional oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye yang terdapat dalam buku *Power and Interdependence: World Politics in Transition*. Terdapat beberapa asumsi dasar yang tergantung dalam teori ini di antaranya adalah *Linkage Strategies* (strategi yang sesuai), *Agenda Setting* (masalah politik dalam dan luar negeri), dan *Transnational and Transgovernmental Relations* (interdependensi menciptakan hubungan antar pemerintah dan rakyat).⁷

Dalam konsep *bailout* terbagi atas 2 jenis yaitu *Bailout* Pemerintah dan *Bailout* Personal. *Bailout* pemerintah terjadi dalam situasi ketika terdapat sebuah perusahaan yang terancam bangkrut, pemerintah membayar atau meminjamkan uang agar dapat keluar dari krisis. Biasanya hanya terjadi kepada perusahaan-perusahaan besar industri yang apabila bangkrut, banyak orang akan kehilangan pekerjaan dan berdampak pada perekonomian negara tersebut. Pemerintah. Sedangkan *bailout* personal di golongan kepada pelaku bisnis perorangan yang memiliki hutang dan melakukan pinjaman kepada kreditur.

⁷ Robert O. Keohane dan Joseph Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, (Boston: Little Brown, 1977), hal. 26

II. Isi

Tingginya Kepentingan Finansial Uni Eropa Menjaga Stabilitas Finansial Kawasan dari pada Kepentingan Finansial Yunani

Kestabilan finansial kawasan merupakan kepentingan yang utama bagi Uni Eropa. Perbandingan yang terjadi begitu mencolok antara Yunani dengan negara-negara lain dikawasan Uni Eropa, tidak terkecuali negara yang juga mengalami krisis finansial dengan kedekatan waktu yang tidak jauh.

Stabilitas finansial negara dapat dilihat dari ekonomi makro negara tersebut, antara lain terdiri dari tingkat pertumbuhan PDB, tingkat inflasi, tingkat utang, tingkat defisit dan jumlah pengangguran. Ekonomi makro Yunani yang sebelumnya sudah menurun, setelah implementasi *bailout* pertama tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan tetapi malah memburuk. Di sisi lain ekonomi makro negara-negara kawasan Uni Eropa cenderung stabil. Menurut hasil analisa pada ekonomi makro Uni Eropa dan grafik naik turunnya nilai Euro terhadap dollar dapat diketahui bahwa pasar mulai percaya bahwa Yunani menepati janjinya untuk membayar utang dan tidak terjadi gagal bayar, walaupun ekonomi makro Yunani tidak menunjukkan perbaikan.⁸

Kebijakan *bailout* juga memunculkan kekhawatiran Uni Eropa lainnya yaitu *moral hazard*. Dilandasi dengan latar belakang Yunani yang pandai menyembunyikan kesalahannya hingga akhirnya terungkap, langkah Uni Eropa untuk mencegah terjadinya *moral hazard* pada *bailout* adalah dengan membentuk

⁸ Ardagna.& Caselli, F.,2012,*The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale Of Two Bailout*,[journal online] diakses tanggal 22 Desember 2015, tersedia dalam: <http://econpapers.repec.org/RePEc:cep:cepsps:25>, hlm. 8-10

Troika. Troika dapat menekan terjadinya moral hazard yang menumpangi kepentingan bailout sesungguhnya karena keterlibatan tiga lembaga besar yang mengawasi pemberian dan penggunaan dana.⁹

Bailout tidak didapatkan secara gratis oleh Yunani tetapi bersyaratkan disiplin fiskal. *Austerity* (disiplin fiskal) yang diberikan pada Yunani oleh Uni Eropa dan IMF dicanangkan dalam program EAP. Kebijakan fiskal yang merupakan tugas negara anggota Uni Eropa untuk menjaga perekonomiannya, karena kebijakan moneter ada dibawah kewenangan Bank Sentral Eropa. Dalam krisis Yunani yang merupakan tipikal krisis utang pemerintah, dibutuhkan dana yang cukup untuk dapat melunasi utang yang menumpuk yaitu dengan menambah kas negara lewat penghematan.¹⁰

Reaksi yang paling terlihat pada saat Yunani terkena krisis finansial adalah perubahan status predikat kredit pemerintah Yunani yang turun dratis. Status predikat kredit yang pada awal 2009 menempati status AA- diberikan oleh Standart & Poor's yang berarti masih memiliki potensi sebagai kredit yang lancar berganti menjadi CCC yang artinya sangat buruk dan kemungkinan tidak bisa membayar ketika Yunani menerima *bailout* dari Uni Eropa.¹¹

Dari semua bukti keuntungan yang didapat Uni Eropa melalui kebijakan *bailout* yang paling tidak ternilai harganya adalah kepentingan dalam menjaga keutuhan Uni

Eropa. Keberlanjutan integrasi Uni Eropa berhasil diselamatkan melalui *bailout* pertama ini dengan harga pengorbanan rakyat Yunani. Kebijakan *bailout* tidak saja untuk Yunani, tetapi bermanfaat untuk menjaga stabilitas kawasan dan kelangsungan integrasi Uni Eropa sebagai institusi.

Kebijakan *bailout* dikeluarkan sebagai pencegahan terpecah-belahnya keutuhan Uni Eropa atas isu keluarnya Yunani jika mengalami gagal bayar. Hal tersebut yang membuat negara-negara khawatir mengalami hal yang sama jika Yunani tidak terlebih dahulu mendapatkan *bailout* dari Uni Eropa dan IMF.¹² *Bailout* tetap diberikan karena tingginya kepentingan Uni Eropa untuk menjaga stabilitas finansial kawasannya, walaupun dengan resiko terjadinya resesi ekonomi pada Yunani. Stabilitas finansial kawasan yang terjaga akan menjaga keberlanjutan integrasi Uni Eropa, ketika spekulasi keluarnya Yunani berhembus kencang. Walaupun Yunani harus mengalami dampak buruk dari disiplin fiskal yang ketat untuk mendapatkan dana bantuan, hal ini dilakukan Uni Eropa untuk mengembalikan kepercayaan dunia atas kemampuan Uni Eropa sebagai institusi besar.

Kondisi dalam Negeri Yunani

Secara ekonomi, sebelum bergabung dengan *Eurozone* pemerintah Yunani sudah boros dalam hal anggaran. Setelah mengadopsi Euro sebagai mata uang, pengeluaran publik justru semakin meningkat. Selain itu, Yunani lebih banyak melakukan impor daripada melakukan ekspor. Pengeluaran pemerintah Yunani merupakan salah satu pengeluaran terbesar

⁹ IMF,2013,*Greece:Ex Post Evaluation Of Exceptional Access Under The 2010 Stand-By Arrangement*, [online],diakses tanggal 20 November 2015

¹⁰ European Commission,2010,*Occasional Papers 68:The Economic Adjustment Programme for Greece*, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Pub.,Brussels

¹¹ Martin dan Waller, 2012,*A Brief Explanation of How the Greek Sovereign Debt Crisis Came to Be*, [online] diakses tanggal 30 November 2015

¹² Sulistyono, D.,2012,*Krisis Yunani: Pelajaran Buat Regionalisme ASEAN*,Unair,[online] diakses 20 Oktober 2015

jika dibandingkan dengan negara anggota *Eurozone* yang lain.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah Yunani memiliki pengeluaran yang besar. Salah satunya adalah dikarenakan lemahnya kerangka anggaran Yunani, yang disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya kerangka anggaran yang bersifat jangka menengah, tidak adanya anggaran program yang mendetail, dan kurangnya koordinasi antar lembaga publik Yunani dalam hal anggaran.¹³

Di sektor perbankan, bank negara banyak memberikan subsidi untuk bisnis yang kurang menghasilkan profit. Pemerintah Yunani juga banyak menghabiskan anggaran untuk melakukan pembangunan infrastruktur yang tidak menciptakan produktivitas berkelanjutan, contohnya adalah pembangunan infrastruktur untuk Olimpiade 2004.

Pemerintah juga menghabiskan banyak anggaran untuk militer. Pada tahun 1970an, anggaran tahunan pemerintah Yunani untuk militer berkisar 5,8% dari total PDB, 6,2% pada tahun 1980an, 4,6% pada tahun 1990an, dan 3,1% sepanjang tahun 2000-2008.¹⁴ Yunani adalah negara yang mengeluarkan biaya pertahanan terbesar

kedua di NATO, setelah Amerika Serikat, dan tertinggi di Uni Eropa.¹⁵

Di sektor publik Yunani tumbuh dengan ketidak-efisienan, karena memperkerjakan terlalu banyak orang. Setiap tahunnya upah dan dana pensiun pegawai sektor publik dinaikkan. Jumlah alokasi dana untuk gaji pemerintah naik hampir 100% sepanjang tahun 2000-2008, yaitu menjadi 27 juta Euro atau 11,4% dari total PDB. Padahal di periode yang sama, nominal PDB hanya bertumbuh 74%. Di tahun 2009, gaji pegawai pemerintah naik lagi sebesar 7,5% menjadi 29 juta Euro atau sekitar 12,4% total PDB.¹⁶

Dana pensiun Yunani adalah 95,7% dari total pendapatan sepanjang hidup pegawai. Dana pensiun Yunani merupakan yang tertinggi di wilayah *Eurozone*. Sebagai perbandingan, dana pensiun di Jerman adalah 60,8% dari total pendapatan sepanjang hidup. Selain itu, batas usia pensiun pegawai sektor publik Yunani adalah 58 tahun. Jika dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, standar ini rendah. Batas usia pensiun di Jerman berkisar 65-67 tahun.

Pegawai sektor publik juga memiliki tingkat *job security* yang lebih rendah daripada pegawai sektor privat, bahkan dapat dikatakan bahwa sangat mustahil untuk memecat pegawai sektor publik.¹⁷ Akibatnya, banyak masyarakat Yunani yang lebih memilih untuk bekerja di sektor publik. Sektor publik mempekerjakan lebih

¹³ Georgia Kaplanoglou dan Vassilis T. Rapanos, "The Greek Fiscal Crisis and The Role of Fiscal Governance", dalam *GreeSE Paper No. 48 Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeast Europe*, London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economics and Political Science, 2011, hal. 22-24

¹⁴ Maria Karamessini, "Sovereign Debt Crisis: An Opportunity to Complete The Neoliberal Project and Dismantle The Greek Employment Model", dalam Steffen Lehndorff (ed.), *A Triumph of Failed Ideas – European Models of Capitalism in The Crisis*, Brussels: European Trade Union Institute, hal. 165

¹⁵ Harris Mlyonas, "Is Greece A Failing Developed State? Causes And Socio-Economic Consequences Of The Financial Crisis", Dalam K.E. Botsiou dan A. Klapsis (Eds.), *The Konstantinos Karamanlis Institute For Democracy Yearbook 2011*, Athena: The Konstantinos Karamanlis Institute For Democracy, 2011, hal. 79

¹⁶ European Commission, *Occasional Paper 61*, Brussels: European Commission, 2010, hal. 16

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 164

dari 45% dari total populasi tenaga kerja.¹⁸ Praktik kolusi yang membudaya di sektor publik Yunani juga menyadi penyebab bengkaknya jumlah pegawai di sektor publik. Partai yang memenangi pemilihan umum akan merekrut lebih banyak anggota partainya untuk menempati posisi-posisi strategis di sektor pemerintahan.¹⁹

Rendahnya jumlah tenaga kerja di sektor privat menyebabkan sektor privat Yunani tidak kompetitif dan produktif. Sektor privat Yunani hanya terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil. Perusahaan besar hanya bergerak di bidang persenjataan militer maritim. Rendahnya daya saing Yunani juga dapat dilihat dari sangat rendahnya aktivitas ekspor produk dan jasa Yunani. Bahkan semenjak bergabung dengan *Eurozone*, jumlah ekspor Yunani semakin berkurang.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Yunani bukan berdasarkan pada ekspor, sehingga struktur perekonomiannya lemah karena hanya mengandalkan sumber daya dari Uni Eropa.

Bisnis juga tidak terlalu tumbuh subur di Yunani juga disebabkan karena sulitnya membuka bisnis di Yunani. Salah satunya adalah rumitnya birokrasi Yunani, yang akhirnya menyebabkan panjangnya proses administrasi untuk melakukan bisnis. Untuk mendirikan suatu perusahaan, pelaku

bisnis harus melalui 15 prosedur yang kira-kira memakan waktu 38 hari. Padahal rata-rata negara di Eropa memiliki 6 prosedur yang kira-kira memakan waktu 25 hari. Selain banyaknya prosedur yang harus dilalui, apabila ingin membuka bisnis, pihak yang bersangkutan harus secara mandiri mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan cara data ke kantor administrasi Yunani. Padahal di negara-negara Eropa lain sudah memberlakukan pengiriman dokumen administrasi melalui surat elektronik.²¹ Pada tahun 2009, Yunani berada di urutan ke-109 pada survey yang dilakukan World Bank mengenai tingkat kemudahan melakukan bisnis di suatu negara. Peringkat Yunani berada di bawah negara-negara Afrika seperti Uganda, Yemen, dan Ethiopia.²²

Manajemen pemungutan pajak yang buruk menjadi penyebab rendahnya pemasukan pemerintah Yunani. Menghindari pajak menjadi suatu hal yang lazim dilakukan di Yunani, baik itu oleh perusahaan besar, pemerintah, perbankan, bahkan masyarakat sipil. Sistem pajak Yunani juga sangat buruk. Pajak hanya dikenakan kepada masyarakat golongan atas, yang notabene populasinya sangat kecil di Yunani. Masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah 12.000 Euro per tahun tidak dikenakan pajak.²³ Banyak masyarakat Yunani yang melakukan kecurangan dengan memalsukan data pendapatan untuk menghindari pajak. Akibat praktik korupsi,

¹⁸ Corinne Deloy dan Stellina Galitopoulou, "Great Uncertainty Just One Month Before The Next Greek General Elections", dalam *European Elections Monitor: GENERAL ELECTIONS IN GREECE 6th May 2012*, Paris: The Robert Schuman Foundation, 2012, hal. 4

¹⁹ Christos Lyrantzis, *Greek Politics in the Era of Economic Crisis: Reassessing Causes and Effects*, London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economics and Political Science, 2011, hal. 3-4

²⁰ Pantelis Sklias dan George Galatsidas, *The Political Economy of the Greek Crisis: Roots, Causes and Perspectives for Sustainable Development*, dalam EuroJournals Publishing, Inc, 2010, hal. 169

²¹ Steven Panageotou, *A Critical Literature Review of the Greek Financial Crisis*, 2011, hal. 7

²² Anne Sibert, *The Greek Sovereign Debt Crisis and The Eurosystem*, Brussels: Policy Department Economic and Scientific Policies, European Parliament, 2010, hal. 5

²³ Georgia Kaplanoglou dan Vassilis T. Rapanos, *The Greek Fiscal Crisis and The Role of Fiscal Governance*, London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economics and Political Science, 2011, hal. 30-32

setiap tahunnya pemerintah Yunani diestimasikan merugi sebesar 8% dari jumlah PDB.²⁴ Yunani adalah negara terkorup di Eropa, khususnya di *Eurozone*.

Kesenjangan antara Prinsip Intergovernmentalis dan Kedaulatan Nasional dalam Kasus Krisis Eropa.

Uni Eropa merupakan organisasi kawasan yang sebenarnya nyaris penuh dengan keberhasilan. Tahun 1995 hampir seluruh negara Eropa Barat ikut bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Tahun 1998 sistem keuangan Eropa terintegrasi dalam mata uang tunggal: *Euro*. Tahun 2004 bertambah lagi 10 negara anggota baru. Mereka adalah negara-negara ex-komunis Eropa Timur. Ini menjadikan Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi besar di dunia sekaligus menjadi contoh organisasi regional terbaik di dunia. Wajar saja kalau keberadaannya dikagumi oleh organisasi regional manapun di dunia. Bahkan pada tahun 2012 Uni Eropa mendapatkan hadiah nobel untuk perannya menyatukan benua biru tersebut.

Optimisme terhadap Uni Eropa berbalik dan membuat harapan itu goyah dengan adanya krisis ekonomi yang mulai melanda Uni Eropa pada tahun 2008. Dampaknya masih dirasakan hingga saat ini. Krisis ekonomi tersebut telah membuat Uni Eropa mulai memasuki fase-fase sulit. Badai krisis yang dialami negara-negara Eropa memiliki 'efek domino' terhadap negara-negara Eropa lain.²⁵

Secara umum terdapat sejumlah pandangan yang telah berusaha menangkap

signifikansi fenomena yang terjadi di Eropa. Pandangan pertama bertumpu pada pendekatan yang melihat bahwa krisis finansial yang belum terselesaikan hingga saat ini disebabkan oleh keterlambatan penanganannya. Lynn (2011) dalam buku "*BUST Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis*" menuliskan bahwa belum terselesaikannya krisis di zona Eropa dikarenakan terlambatnya para petinggi-petinggi di zona Eropa dalam menyadari kondisi keuangan Yunani yang sudah tidak mampu membayar jatuh tempo utangnya.²⁶

Hal lain adalah keengganan negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Jerman untuk menolong Yunani pada awal krisis utang ini terjadi. Ketika krisis meletus pada tahun 2008, kondisi Yunani sudah demikian parah sehingga menyebabkan kepanikan terhadap pasar. Hal ini sebagaimana ditulis²⁷:

"The Euro-zone's leaders had ignored the crisis brewing in Greece for year after year. When it broke into the open, they tried to pretend it wasn't their problem, then blamed everyone else, and once it threatened to overwhelm them, allowed themselves to be rushed into a solution, while it may fixed the immediate crisis, was only storing up even worse problems a little further down the road".

Kelalaian ini menandakan dua hal. Pertama, bahwa peraturan berlandaskan perjanjian *Stability and Growth* pada 2003 telah gagal mengawasi perilaku negara-negara anggota Uni Eropa dan gagal dalam menerapkan sanksi. Minimnya pengawasan pada akhirnya menghasilkan tingginya utang

²⁴ Steven Panageotou, *Op.Cit.*, hal. 5

²⁵ B. Witte,.,2011,*The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism dalam European Policy Analysis*.Sieps Press.,Swedia[online], diakses tanggal 20 November 2015

²⁶ Matthew Lynn. 2011. *Bust: Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis*. London: John Wiley & Sons. Hlm. 23

²⁷ *Ibid*. Hlm 25

Yunani dan Italia pada awal krisis ini terjadi. Kedua, tidak adanya solidaritas negara-negara anggota Uni Eropa di awal krisis ini terjadi. Sehingga Uni Eropa dianggap tidak mempunyai legitimasi yang mumpuni untuk mengawasi negara-negara anggotanya. Hal ini diperparah dengan pada waktu krisis terjadi tidak adanya mekanisme dalam penanganan krisis ekonomi yang terjadi untuk menyelamatkan negara-negara di zona Eropa, sehingga krisis ini menyerang Eropa secara tiba-tiba tanpa ada petunjuk bagaimana mengatasinya.²⁸

Pandangan kedua tentang penyebab terus memburuknya perekonomian negara-negara Eropa diberikan oleh yakni hilangnya kemampuan negara untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat dalam masa krisis sehingga negara-negara seperti Yunani terjebak dalam krisis ekonomi.²⁹ Negara-negara yang bergabung dalam zona Eropa kehilangan kendali untuk menghadapi keadaan di luar perkiraan mereka. Semestinya sebuah negara mampu melakukan pencegahan sebelum krisis ekonomi muncul. Hal inilah yang kurang dari sebuah integrasi di zona Eropa.³⁰

Pandangan ketiga, berpendapat bahwa krisis ini sulit untuk diselesaikan dikarenakan integrasi ekonomi dan politik di Uni Eropa sangat tergantung dari kerja sama antara Jerman dan Prancis sebagai dua negara kuat di Uni Eropa. Seperti yang ditulis oleh Glomb, *“Without an agreement between France and Germany, nothing happens in Europe. At the same time, this Franco – German bilateralism invites endless criticism for promoting a “Franco-*

*German diktat” which is more harmful than beneficial to the European project.”*³¹ Pendapat ini telah terbukti dengan gagalnya perjanjian konstitusi Eropa di Roma pada 29 Oktober 2004 dikarenakan Prancis melakukan referendum berkaitan dalam masalah ini akhirnya konstitusi Eropa pun tidak terwujud.

Awal Krisis Eropa dan Krisis Yunani

Pada tahun 2008 imbas krisis keuangan dan perbankan Amerika Serikat melanda Eropa, dan hingga kini krisis tersebut di Eropa belum sepenuhnya selesai terutama di Yunani. Sejumlah langkah telah ditempuh oleh Uni Eropa, ECB dan IMF namun belum terlihat tanda bahwa Yunani akan keluar dari masalah yang dihadapi.

Krisis ekonomi dan keuangan yang dialami oleh Yunani bermula pada tahun 2008, saat krisis keuangan dan perbankan melanda Amerika Serikat akibat transaksi sub-prime mortgage yang gagal dan berakibat ditutupnya sejumlah bank di Amerika Serikat. Terpuruknya sektor keuangan Amerika Serikat berimbas ke perekonomian di sejumlah negara Eropa Barat. Negara yang paling berat mengalami krisis antara lain Irlandia, Islandia serta sejumlah negara di Eropa Selatan seperti Italia, Spanyol, Portugal dan Yunani. Perekonomian seluruh negara tersebut mengalami resesi.³²

Pada awal 2010, pertumbuhan utang nasional Yunani semakin mengkhawatirkan. Pemerintah memberi sinyal bahwa Yunani memerlukan dana talangan darurat. Sampai pertengahan tahun 2015 krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Yunani masih berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda

²⁸ Lelieveldt. & Princen, S., *The Politics of The European Union*. Cambridge University Press., USA

²⁹ Karagiannis, N. & Kondeas, A., 2012, *The Greek Financial Crisis and A Developmental path To Recovery: Lesson and Option* dalam Real World Economy Review Issue no. 60. Hlm. 12

³⁰ *Ibid.* Hlm 13

³¹ Michael Pollack. 2010, *Policy-making in the European Union*, Oxford University Press

³² Lihat Robert C. Guell, *Issues in Economics Today*, McGraw-Hill International Edition, 2015.

pemulihan yang berarti. Keadaan negara-negara lain di Eropa yang terkena krisis relatif sudah lebih baik jika dibanding dengan keadaan Yunani. Pada bulan Maret 2015 tingkat pengangguran di Yunani mencapai sekitar 25,6% (eurostat, bureau of labor statistic) dan tingkat pengangguran di kalangan pekerja usia muda bulan Juni 2015 pada mencapai 53,7%, tertinggi di antara negara anggota Uni Eropa.³³ International Monetary Fund (IMF) memperkirakan bahwa pada tahun 2015 ekonomi Yunani masih akan turun sekitar 2,26% dibanding tahun sebelumnya.

Usaha Uni Eropa Membantu Yunani dalam Mengatasi Krisis

Keadaan Yunani sebelum krisis tidak lebih baik dari Irlandia, Italia dan Spanyol. Rasio pinjaman selalu tinggi dan defisit lebih buruk. Sangat mungkin keadaannya lebih buruk dari pada data yang disajikan oleh pemerintah.³⁴ Seperti kemudian terungkap bahwa pada saat bergabung dengan sistem mata uang Euro ternyata Yunani tidak mengungkapkan keadaan keuangan yang sebenarnya. Defisit anggaran terhadap PDB lebih besar dari ketentuan batas tertinggi 3%, dan rasio utang terhadap PDB lebih dari 100%, jauh di atas 60% yang disyaratkan. Hal ini dimungkinkan karena adanya bantuan perusahaan keuangan Goldman Sachs kepada pemerintah untuk menyembunyikan keadaan keuangan melalui transaksi *credit swap* yang rumit.

Keadaan ini berlanjut ketika pada tahun 2004 Yunani menjadi tuan rumah acara olimpiade dimana rasio pinjaman dan utang mencapai 6,1% dan 110,6% dari PDB. Setelah krisis keuangan, pada tahun 2009

³³ www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries Diakses pada 4 Januari 2016

³⁴ Engelbert Stockhammer, 2014, The Euro Crisis and Contradictions of Neoliberalism in Europe, Post Keynesian Economics Study Group working paper 1401. Hal 222

pemerintahan baru di bawah pimpinan perdana menteri George Papandreu dari partai sosialis keadaan keuangan kembali memburuk dengan deficit menjadi lebih dari 12%, suatu angka yang kemudian dikoreksi menjadi 15,4%. Hal ini membuat kepercayaan masyarakat menjadi turun.

Beberapa langkah yang disarankan oleh Komisi Eropa untuk menyehatkan keuangan Yunani adalah pengurangan jumlah pegawai negeri sebanyak 25.000 orang, reformasi pajak dan perubahan skema jaminan pension pegawai negeri. Usul ini telah menimbulkan gejolak sosial dan pemerintah Yunani tidak berani melaksanakan kebijakan tersebut.

Reformasi pajak berupa meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak sulit dilaksanakan dan selalu gagal. Penghindaran pajak oleh individu dan perusahaan sudah sangat meluas dan sulit untuk dilacak. Setiap orang beralasan untuk tidak membayar pajak dengan alasan bahwa orang lain belum membayar pajak (karena karakter orang Yunani yang memang suka menghindari membayar pajak).³⁵

Yunani dan Kegagalan Mengatasi Krisis Pasca *Bailout*

Total dana bantuan yang dialokasikan untuk Yunani: sekitar 244 miliar euro dari UE/IMF, ditambah bantuan dari ECB berupa surat obligasi senilai 50 miliar euro.

Dari semua yang telah dijelaskan, terlihat bahwa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu politik, pemerintah dan masyarakat Yunani sangat berperan dalam menyebabkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan yang selalu ditentang bahkan dapat menjatuhkan

³⁵ Robert C. Guell, Issues in Economics Today, McGraw-Hill International Edition, 2015. Hal. 222

pemerintah, ditambah kesulitan untuk menarik pajak dari warga dan perusahaan merupakan masalah klasik, terlepas siapa yang memerintah atau apapun bentuk kebijakan yang diterapkan.

Perubahan pemerintah yang menjadi lebih populis menyebabkan proses negosiasi dengan kreditur menjadi berlarut-larut. Jika pemerintah tidak dapat memberikan solusi maka keadaan keuangan akan memburuk, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dimana diberlakukan pembatasan dalam mengambil uang tunai melalui ATM di sistem perbankan.

Penjelasan alternatif adalah karena paket kebijakan Uni Eropa merupakan bentuk neoliberalisme, dan Traktat Maastricht dan Pakata Stabilitas dan Pertumbuhan mengutamakan kebijakan anti inflasi dengan membatasi kebijakan fiskal tanpa mekanisme pengimbang. Devaluasi merupakan salah satu mekanisme yang biasa diambil oleh negara dalam mengatasi kesulitan ekonomi, namun dengan berlakunya satu mata uang hal ini sudah tidak dimungkinkan.

Keadaan ekonomi Yunani yang semakin buruk tersebut merupakan alasan yang membuat bursa-bursa saham global kembali dihantui krisis pada saat ini. Pada tahun 2009 lalu, rasio utang Yunani terhadap GDP-nya tercatat 127%. Yunani sebenarnya memiliki potensi investasi yang cukup menarik bagi para investor, namun krisis yang melanda daratan Eropa belakangan ini telah menimbulkan ketidakpercayaan para investor terhadap sektor keuangan di Eropa khususnya Yunani dan hal ini tentu akan memperparah krisis di Yunani dan jika krisis ini tidak ditanggulangi maka Yunani terancam benar-benar bangkrut.

Persoalan mata uang memang menjadi urusan kawasan Eropa sebagai sebuah kesatuan, tapi anggaran dan

persoalan ekonomi hanya sebagian saja yang terintegrasi. Masing-masing negara pun ingin membatasi tanggung jawab dalam menanggung utang negara lain dan untuk mencegah campur tangan negara lainnya dalam kebijakan ekonomi. Itulah yang menyebabkan hingga kini, tanda-tanda perbaikan belum juga terlihat dan makin menambah kecemasan para pemimpin dunia.

III. Simpulan

Dengan menggunakan teori *Complex Interdependence* dalam melihat Uni Eropa dan IMF sebagai *lender of last resort*, kegagalan kebijakan *bailout* pertama oleh Uni Eropa dan IMF dalam mengatasi krisis finansial Yunani dikarenakan terlalu kompleksnya permasalahan *bailout* terhadap Yunani. Hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas *bailout* dalam mengatasi krisis finansial Yunani. Masalah tersebut seperti Uni Eropa lebih terfokus dalam menjaga stabilitas finansial kawasan, dari pada mengatasi krisis ekonomi di Yunani sendiri. Sehingga kebijakan yang diambil pun tidak maksimal.

Permasalahan berikutnya adalah kondisi dalam negeri Yunani yang terkesan berfoya-foya dan boros dalam hal anggaran. Ditambah lagi Pengeluaran yang besar, impor lebih besar dari ekspor, budaya korupsi serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Di tambah lagi adanya benturan kepentingan sesama negara-negara maju Uni Eropa.

Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara Uni Eropa tidak dapat diselesaikan, jika ditengah situasi ekonomi yang terus menanjak di regional tersebut. Hal ini disebabkan adanya persaingan dan benturan kepentingan nasional dari negara-negara maju Uni Eropa seperti Jerman, Perancis dan Inggris. Di tambah lagi, krisis ini dipicu dengan menguatnya sentimen (ego) nasional dan mulai meluasnya krisis

ekonomi yang terjadi menjadi krisis politik yang menunjukkan semakin sulitnya menyatukan pandangan dan posisi dalam menghadapi krisis secara regional.

Referensi

Buku

Harvey, David. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.

Matthew, Higgins,; Klitgaard, Thomas. 2011. "Saving Imbalances and the Euro Area Sovereign Debt Crisis. Current Issues in Economics and Finance (Federal Reserve Bank of New York) pada http://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci17-5.pdf

Keohane, Robert O., 1984, *After Hegemony, Cooperation and Discord in the World Political Economy*, Princeton University Press.

Lynn, Matthew. 2011. *Bust: Greece, the Euro, and the Sovereign Debt Crisis*. London: John Wiley & Sons.

Guell, Robert C., *Issues in Economics Today*, McGraw-Hill International Edition, 2015.

Jurnal dan Working Papers

Ardagna.& Caselli, F.,2012,*The Political Economy of the Greek Debt Crisis: A Tale Of Two Bailout*,[journal online] diakses tanggal 22 Desember 2015, tersedia dalam: <http://econpapers.repec.org/RePEc:cep:cepsps:25>

IMF,2013,*Greece:Ex Post Evaluation Of Exceptional Access Under The 2010 Stand-By Arrangement*, [online],diakses tanggal 20 oktober

2013, tersedia di: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13156.pdf>

European Commission,2010,*Occasional Papers 68:The Economic Adjustment Programme for Greece*, Directorate-General for Economic and Financial Affairs Pub.,Brussels

Martin dan Waller, 2012,*A Brief Explanation of How the Greek Sovereign Debt Crisis Came to Be*, [online] diakses tanggal 10 oktober 2013, tersedia di: <http://www.reed.edu/economics/parker/f12/341/Sim/rpts/Greece.pdf>

Sulistyo, D.,2012,*Krisis Yunani: Pelajaran Buat Regionalisme ASEAN*,Unair,[online] diakses 20 Oktober 2014 tersedia dalam: <http://djoko-s-d-fisip.web.unair.ac.id>

Georgia Kaplanoglou dan Vassilis T. Rapanos, *The Greek Fiscal Crisis and The Role of Fiscal Governance*, London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economics and Political Science, 2011

Karamessini, Maria, "Sovereign Debt Crisis: An Opportunity to Complete The Neoliberal Project and Dismantle The Greek Employment Model", dalam Steffen Lehndorff (ed.), *A Triumph of Failed Ideas – European Models of Capitalism in The Crisis*, Brussels: European Trade Union Institute.

Mlyonas, Harris, "Is Greece A Failing Developed State? Causes And Socio-Economic Consequences Of The Financial Crisis", Dalam K.E. Botsiou dan A. Klapsis (Eds.), *The Konstantinos Karamanlis Institute For Democracy Yearbook 2011*, Athena:

- The Konstantinos Karamanlis Institute For Democracy, 2011
- European Commission, *Occasional Paper 61*, Brussels: European Commission, 2010
- Corinne Deloy dan Stellina Galitopoulou, "Great Uncertainty Just One Month Before The Next Greek General Elections", dalam *European Elections Monitor: GENERAL ELECTIONS IN GREECE 6th May 2012*, Paris: The Robert Schuman Foundation, 2012
- Lyrintzis Christos, *Greek Politics in the Era of Economic Crisis: Reassessing Causes and Effects*, London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economics and Political Science, 2011.
- Sklias, Pantelis dan George Galatsidas, *The Political Economy of the Greek Crisis: Roots, Causes and Perspectives for Sustainable Development*, dalam EuroJournals Publishing, Inc, 2010.
- Panageotou, Steven, *A Critical Literature Review of the Greek Financial Crisis*, 2011.
- Sibert, Anne, *The Greek Sovereign Debt Crisis and The Eurosystem*, Brussels: Policy Department Economic and Scientific Policies, European Parliament, 2010
- Georgia Kaplanoglou dan Vassilis T. Rapanos, *The Greek Fiscal Crisis and The Role of Fiscal Governance*, London: Hellenic Observatory European Institute, London School of Economics and Political Science, 2011
- B. Witte, 2011, *The European Treaty Amendment for the Creation of a Financial Stability Mechanism* dalam *European Policy Analysis*, Sieps Press, Swedia[online], diakses tanggal 20 November 2014, tersedia dalam: <http://cadmus.eui.eu>
- Lelieveldt. & Princen, S., *The Politics of The European Union*. Cambridge University Press., USA
- Karagiannis, N. & Kondeas, A., 2012, *The Greek Financial Crisis and A Developmental path To Recovery: Lesson and Option* dalam Real World Economy Review Issue no. 60.
- Pollack, Michael. 2010, *Policy-making in the European Union*, Oxford University Press
- Engelbert Stockhammer, 2014, *The Euro Crisis and Contradictions of Neoliberalism in Europe*, Post Keynesian Economics Study Group working paper 1401.

Situs Web

- "Penyebab Krisis Ekonomi Eropa", terdapat dalam <http://mss-feui.com/?p=605/2012/10/10> diakses tanggal 25 Juli 2015
- "EFSF Eropa" terdapat dalam <http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm> diakses pada 29 April 2015
- "Krisis Ekonomi Eropa Sudah Menjalar ke Indonesia", <http://www.bisnis.com/articles/nah-lo-dot-krisis-ekonomieropa-sudah-menjalar-ke-indonesia> diakses tanggal 20 Juli 2015
- "The Crisis and the Consolidation of Class Power Is This Really the End of Neoliberalism?" Terdapat dalam <http://www.counterpunch.org> diakses pada tanggal 3 Juli 2015 pukul 05.55 WIB.